



SUPARDI
KETUA DPRD
SUMBAR

IRSYAD SAFAR
WAKIL KETUA
DPRD SUMBAR

SUWIRPEN SUIB
WAKIL KETUA
DPRD SUMBAR

INDRA DT RAJO LELO
WAKIL KETUA
DPRD SUMBAR

RAFELIS
SEKRETARIS
DPRD SUMBAR

DPRD Sumbar Gelar Konsultasi Publik Pembahasan RPJPD 2025-2045

PADANG - SINGGALANG

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menggelar konsultasi publik pembahasan rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) Sumbar Tahun 2025-2045, Kamis (4/7) di gedung dewan setempat.

Dalam konsultasi publik tersebut diagendakan sinkronisasi RPJPD provinsi dengan RPJPD Kabupaten/kota se-Sumbar.

Wakil Ketua DPRD Sumbar Irsyad Syafar mengatakan, pelaksanaan konsultasi publik ini mengacu pada intruksi Menteri Dalam Negeri tentang pedoman umum penyusunan RPJPD tahun 2024-2045.

"Tujuan konsultasi publik untuk menerima masukan, pendapat dan saran dari Kabupaten/kota di Sumbar. Sehingga RPJPD bisa disempurnakan," ujar Irsyad.

Ia mengatakan perencanaan pembangunan daerah memiliki fungsi yang sangat strategis untuk menentukan tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

"Selain itu juga penting untuk menjamin penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan serta sasaran yang diinginkan," ujarnya.

Irsyad menjelaskan, dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem per-



encanaan nasional, diamanatkan pembangunan daerah dilakukan secara bertahap, berkesinambungan dan konsisten.

Selain itu, meskipun ada amanat untuk penyelarasan RPJPD Provinsi dengan RPJMN sebagaimana diatur dalam Instruksi Mendagri Nomor 1 Tahun 2024 dan Peraturan Bersama Mendagri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, namun pemerintah Sumbar harus juga memperhatikan kondisi, kebutuhan dan karakteristik daerah. Sehingga RPJPD tersebut nanti dapat dilaksanakan.

Ketua Pansus pembahasan

RPJPD Sumbar Tahun 2025-2045, M. Nurnas mengatakan, arah kebijakan RPJPD Tahun 2025-2045 mengacu pada visi Sumatera Barat Madani, Maju dan berkelanjutan berlandaskan agama dan budaya. Lalu mengacu pula pada misi mewujudkan transformasi sosial menuju sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.

"Oleh karena itu tanggung jawab kita bersama menyempurnakan RPJPD. Serta rekan-rekan di daerah dapat mengawal RPJPD ini berjalan lancar dan sukses," ujarnya.

Nurnas memaparkan DPRD Sumbar menyusun RPJPD dengan mengacu pada berbagai hal. Pertama mengacu pada visi nasional maju dan berkelanjutan. Kedua mengacu pada lima visi daerah yang telah dituangkan dalam surat gubernur.

"Selaraskan pula dengan delapan misi pembangunan dan 17 arah pembangunan. Semua ya tak boleh lari dari situ. Khusus untuk daerah ada pula imbauan untuk penyesuaian dengan karakteristik daerah masing-masing," tuturnya.

Kemudian, lanjut Nurnas ada 45 indikator pembangunan yang diantaranya tentang transformasi sosial, ekonomi, ketahanan sosial budaya ekologi, supremasi hukum stabilitas ketangguhan diplomasi, transformasi tata kelola.

Ia mengatakan meskipun ada amanat untuk penyelarasan RPJPD Provinsi dengan RPJMN sebagaimana diatur dalam Instruksi Mendagri Nomor 1 Tahun 2024 dan Peraturan Bersama Mendagri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, namun tentu pemerintah Sumbar harus juga memperhatikan kondisi, kebutuhan dan karakteristik daerah agar RPJPD tersebut nanti dapat dilaksanakan.

Untuk Sumbar, perlu diper-

hatikan pula bahwa dalam penyusunan RPJPD perlu dipastikan semua arah kebijakan pembangunan yang patuh pada lingkungan. Hal ini dikarenakan banyak daerah di Sumbar yang memiliki kerawanan bencana.

"Jangan sampai arah dan kebijakan mengkhianati lingkungan," katanya.

Nurnas memaparkan bahwa RPJPD merupakan arah dan kebijakan. Nantinya hal lebih teknis akan diatur dalam RPJMD.

"Untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan semua program dan kebijakan pemerintah tiap tahunnya mesti mengarah para RPJPD dan RPJMD," katanya.

Pada kesempatan sebelumnya, Ketua DPRD Sumbar, Supardi mengatakan terkait ranperda RPJPD Sumbar Tahun 2025-2045, Supardi menyampaikan beberapa hal penting, yakni sesuai dengan tahapan penyusunan dan pembahasan RPJPD sebagaimana yang diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Instruksi Mendagri Nomor 1 Tahun 2024, DPRD bersama Pemerintah Daerah telah menyepakati Rancangan Awal RPJPD Tahun 2025-2045 yang akan menjadi acuan dalam penyusunan Ranperda RPJPD.

"Secara umum, dalam rancangan awal RPJPD tersebut, telah disepakati visi, misi, kebijakan, sasaran pokok yang akan ditampung dalam RPJPD Provinsi Sumbar Tahun 2025-2045," ujarnya.

Namun, lanjut Supardi, perlu dipahami bersama, bahwa kebijakan dan sasaran pokok yang terdapat dalam rancangan awal tersebut, masih perlu didalami kembali dalam penyusunan Ranperda RPJPD. Hal ini dikarenakan muatannya sebagian besar ditentukan langsung oleh pemerintah. (*)

